

## **Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingya Asal Myanmar Tahun 2020-2022**

**R. K. Indradipradana**  
**Frieska Haridha**  
*Universitas Pertamina*

### **Abstract**

*The Rohingya ethnic conflict is one of the conflicts that occurred due to instability in political life and society in Myanmar. The cause of this conflict was discrimination against the Rohingya ethnic group, which resulted in quite a few Rohingya people fleeing. In 2015, Indonesia, Malaysia, and Thailand agreed to allow Rohingya refugees into their territories. However, Thailand and Malaysia in 2020-2022 did not permit Rohingya refugees to enter their territory. The rejection of these two countries caused Indonesia to become the only country in the world that accepted Rohingya refugees even though it did not ratify the 1951 Convention and the 1967 Protocol. This qualitative research focuses on discussing the factors that prompted Indonesia to accept Rohingya refugees in 2020-2022 with internet-based research in data collection. In addition, this research uses foreign policy from Kegley and Raymond (2012). This research shows that four factors encourage Indonesia to accept Rohingya refugees: geostrategic position, economic conditions, type of government, and decisions & leadership capacity.*

**Keywords:** *Indonesia; Rohingya; Foreign Policy; Myanmar*

### **Abstrak**

*Konflik etnis Rohingya menjadi salah satu konflik yang terjadi di Myanmar akibat ketidakstabilan pada kehidupan politik serta masyarakat di Myanmar. Penyebab dari timbulnya konflik ini yakni adanya diskriminasi terhadap etnis Rohingya yang mengakibatkan tidak sedikit masyarakat Rohingya yang mengungsi. Pada tahun 2015, Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah sepakat untuk mengizinkan pengungsi Rohingya masuk ke teritorinya. Namun, Thailand dan Malaysia pada tahun 2020-2022 tidak memberikan izin kepada pengungsi Rohingya untuk masuk ke teritorinya. Penolakan kedua negara tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara satu-satunya di dunia yang menerima pengungsi Rohingya meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada pembahasan terkait faktor-faktor yang mendorong Indonesia dalam memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya pada tahun 2020-2022 dengan internet-based research dalam pengumpulan data. Selain itu, penelitian ini menggunakan kebijakan luar negeri dari Kegley & Raymond (2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat faktor yang mendorong Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya yakni posisi geostrategis, kondisi perekonomian, jenis pemerintahan, serta keputusan & kapasitas pemimpin.*

**Kata-kata kunci:** *Indonesia; Rohingya; Kebijakan Luar Negeri; Myanmar*

## **Pendahuluan**

Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis dari sejumlah etnis yang berada di Myanmar. Di Asia Tenggara, Myanmar dapat digolongkan ke dalam negara yang multikultural. Dalam hal ini, sekitar 60% dari keseluruhan populasi penduduk Myanmar diisi oleh non-Myanmar, di antaranya ras Chin, Karen, Shan, Kachin, Mon, Kayah, Rohingya, dan Rakhine (Mohajan, 2018). Selain itu, Myanmar memiliki penduduk yang mayoritas beragama Buddha (Ashadi, 2022). Berdasarkan sensus pada tahun 2014, sekitar 87,9% dari penduduk Myanmar memeluk agama Buddha diikuti dengan yang beragama Kristen sebanyak 6,2%, serta 4,3% beragama Islam. Penduduk Myanmar yang beragama Islam banyak yang berasal dari etnis Rohingya. Etnis Rohingya merupakan etnis yang menganut agama Islam dimana dari sisi fisik serta bahasa mempunyai kemiripan seperti orang Bengali dari Bangladesh (Mazhar & Goraya, 2016).

Mengenai eksistensi etnis Rohingya di Myanmar, terdapat dua pandangan terhadap eksistensi Rohingya di Myanmar. Masyarakat etnis Rohingya dalam hal ini dapat dikatakan sebagai penduduk asli yang berasal dari daerah Rakhine. Pandangan terhadap etnis Rohingya ini didasarkan pada keberadaan dari kehidupan masyarakat etnis Rohingya di daerah tersebut selama berabad-abad lalu (Moy & Kusuma, 2016). Sementara di sisi lain, masyarakat dan pemerintah Myanmar sebagian besar memiliki pandangan bahwa masyarakat etnis Rohingya tidak datang dari Myanmar dan bukan bagian dari “etnis nasional” Myanmar (HRW, 2000). Pandangan ini kemudian mengakibatkan pemerintah Myanmar memberikan perlakuan yang berbeda terhadap etnis Rohingya. Dalam hal ini, pemerintah Myanmar melakukan tindakan yang diskriminatif, penyiksaan, serta pengusiran terhadap etnis Rohingya (Moy & Kusuma, 2016). Pemerintah Myanmar melakukan tindakan tersebut karena etnis Rohingya tidak dipandang sebagai salah satu etnis di Myanmar (Arianta et al., 2020).

Tindakan diskriminatif pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya pada hakikatnya telah terjadi sejak tahun 1962. Pada saat itu, pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan U Nay Win meluncurkan operasi pengusiran secara paksa terhadap etnis Rohingya yang disertai dengan sejumlah aksi yang sistematis. Dalam hal ini, tindakan yang berupa extra judicial killing, penyitaan terhadap properti, propaganda anti-Rohingya, limitasi pada lapangan kerja, dan larangan praktik dalam beragama dilakukan oleh pemerintah Myanmar (Mangku, 2021). Oleh karena tindakan tersebut, etnis Rohingya dilihat sebagai “orang asing” di negara mereka sendiri. Pandangan ini berlandaskan pada realita bahwa etnis Rohingya yang memeluk agama Islam hidup di Myanmar yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha (Kosem & Saleem, 2018). Tidak hanya itu, tindakan pemerintah Myanmar ini mengakibatkan etnis Rohingya

mengungsi ke negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar guna mencari tempat untuk berlindung (Mangku & Lasmawan, 2020).

Di Myanmar, keberadaan etnis Rohingya kian terpojok pasca penetapan terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982. Penetapan UU ini mengakibatkan terhapusnya etnis Rohingya dari daftar delapan etnis utama Myanmar (Mangku, 2021). Penghapusan etnis Rohingya dari daftar delapan etnis utama Myanmar disebabkan pemerintah Myanmar tidak memberikan pengakuan secara resmi terhadap etnis Rohingya sebagai salah satu etnisnya (Karina, 2020). Selain itu, dihapusnya etnis Rohingya dari daftar tersebut karena adanya pandangan terhadap etnis ini yang memandang sebagai ilegal Bengali (Mangku, 2021). Etnis Rohingya dipandang sebagai ilegal Bengali karena etnis ini dinilai sebagai imigran ilegal yang mempunyai karakteristik seperti budaya dan fisik yang serupa dengan orang Bangladesh (Kosem & Saleem, 2016). Di sisi lain, Bangladesh juga tidak memberikan pengakuan terhadap etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negaranya (Mangku, 2021). Dengan demikian, aksi diskriminatif dari pemerintah Myanmar mengakibatkan sekitar 250 ribu orang beretnis Rohingya pada tahun 1992 memutuskan untuk mengungsi ke kota Cox Bazar, Bangladesh (Faruque, 2020).

Pada tahun 2000-an, tindakan kekerasan serta diskriminasi dari pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya kian mengalami peningkatan (Karina, 2020). Kian masifnya tindakan ini terlihat pada tahun 2012 dimana terjadi aksi persekusi terhadap etnis Rohingya. *Burmese Rohingya Organization United Kingdom* (BROUK) mencatat sekitar 650 orang, 1200 orang hilang, dan lebih dari 80 ribu kehilangan tempat tinggal akibat dari konflik ini. Sementara itu, pemerintah Myanmar di bawah pemerintahan Thein Sein pada 11 Februari 2015 mencabut hak suara dari masyarakat etnis Rohingya (Rosyid, 2019). Penghapusan hak suara etnis Rohingya ini merupakan dampak dari penarikan kartu identitas atau yang dikenal dengan Kartu Putih milik masyarakat etnis Rohingya. Pencabutan kartu ini mengakibatkan masyarakat etnis Rohingya pada pemilihan umum tidak dapat memberikan suaranya (Untoro et al., 2016). Pencabutan Kartu Putih ini dengan demikian menjadi pendorong bagi 300 ribu orang etnis Rohingya mengarungi lautan untuk meninggalkan negaranya.

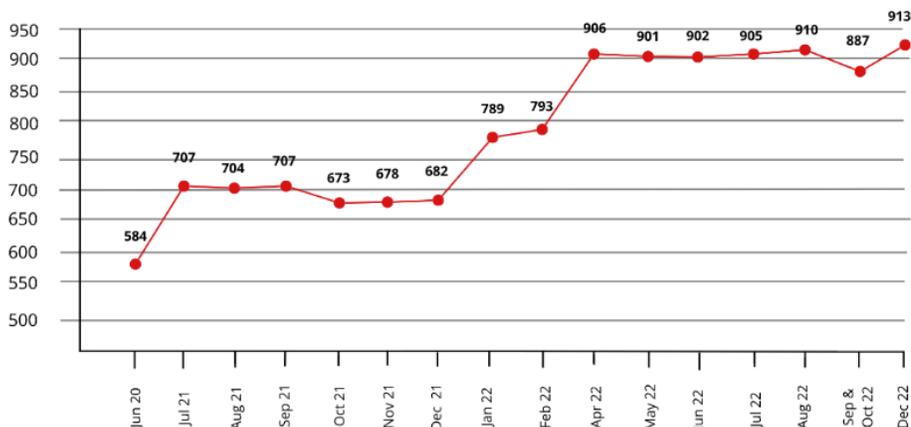
Pada 20 Mei 2015, Thailand, Malaysia, dan Indonesia sepakat untuk memutuskan menerima para pengungsi Rohingya secara sementara. Kesepakatan ini terjadi pada penyelenggaraan pertemuan antar Menteri Luar Negeri di Kuala Lumpur (Bangun, 2017). Keputusan ketiga negara tersebut mengakibatkan pengungsi Rohingya beramai-ramai pergi ke ketiga negara tersebut. Berdasarkan Sekretariat Kabinet (2017), ramainya pengungsi Rohingya yang datang ke ketiga negara ini menyebabkan Indonesia menerbitkan Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam hal ini, terdapat kapal yang bermuatan sekitar 715 pengungsi Rohingya telah terdampar selama berminggu-minggu di kawasan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara. Per November 2016, Indonesia berdasarkan data UNHCR telah menerima lebih dari 1000 pengungsi Rohingya. Tidak hanya itu, Thailand hingga akhir 2015 telah menerima lebih dari 130 ribu pengungsi Rohingya (Augita, 2017).

Keputusan para pengungsi Rohingya untuk pergi ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia karena padatnya kamp pengungsi di Bangladesh. Bangladesh telah menampung lebih dari 400 ribu pengungsi Rohingya, kamp pengungsi yang padat ini membahayakan para pengungsi, dimana telah dilaporkan terdapat dua anak-anak dan seorang perempuan meninggal akibat berdesakan (CNN, 2017). Sehingga, para pengungsi memutuskan meninggalkan Bangladesh untuk memperoleh tempat yang lebih baik. UNHCR (2018) melaporkan ada tiga kapal yang berlayar dari Myanmar. Kapal pertama yang memuat 56 pengungsi telah berlabuh pada 3 April di daerah Langkawi, Malaysia. Kemudian, kapal kedua yang bermuatan 5 pengungsi ini diamankan oleh Indonesia dan dilabuhkan ke daerah Langsa. Sedangkan, kapal terakhir kembali diamankan Indonesia, dimana kapal yang berlabuh di Bireuen ini membawa 79 pengungsi Rohingya. Kedatangan para pengungsi Rohingya ke ketiga negara tersebut menandakan adanya pandangan bahwa ketiga negara ini dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka.

Namun, Malaysia melaporkan pada 26 Juli 2020 terdapat kapal di Pantai Langkawi yang menampung 26 pengungsi Rohingya, dimana Malaysia dan Thailand menolak untuk menampung para pengungsi ke wilayahnya (Amnesty International, 2020). Sementara itu, Indonesia pada tahun 2020 masih mengizinkan pengungsi Rohingya untuk masuk ke wilayahnya. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri RI (2020) mencatat bahwa Indonesia pada 24 Juni 2020 telah menerima 99 pengungsi Rohingya. Selain itu, UNHCR melaporkan bahwa Indonesia per Juni 2020 telah menerima 584 pengungsi Rohingya. Indonesia pada tahun 2021 kembali menerima ratusan pengungsi Rohingya yang berlabuh di Aceh. Namun, Indonesia dalam hal ini hanya berstatus sebagai negara transit (BBC, 2021). Sehingga, status ini mengakibatkan pengungsi Rohingya hanya bisa singgah sementara di Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia menjadi satu-satunya negaranya di dunia yang memperbolehkan kapal pengungsi Rohingya untuk masuk ke teritorinya (BBC, 2023).

**Grafik 1.**  
**Grafik Pengungsi Rohingya di Indonesia (2020-2022)**



UNHCR melaporkan bahwa pengungsi Rohingya yang telah diterima oleh Indonesia per Desember 2022 berjumlah 913 orang. Namun, Indonesia tidak termasuk dalam negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Sehingga, Indonesia tidak berkewajiban dalam pemenuhan hak-hak para pengungsi. Akan tetapi, pengungsi dari berbagai latar belakang dan negara masih diterima oleh Indonesia (Brilianto et al., 2022). Dengan demikian, hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk menganalisis faktor apa saja yang mendorong Indonesia dalam memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya pada tahun 2020-2022.

Penulis pada penelitian ini telah mengkaji terkait sejumlah penelitian terdahulu, dimana penulis meninjau beberapa penelitian di antaranya Sadewa et., al (2019), Matthew (2020), dan Listiarani (2020). Penelitian Dzikiara Pesona Sadewa et., al (2019) memaparkan bahwa lebih dari 1 juta masyarakat etnis Rohingya meninggalkan negaranya untuk mengungsi di Bangladesh. Datangnya para pengungsi menjadi salah satu fokus bagi Bangladesh karena para pengungsi memerlukan bantuan dan perlindungan. Namun, kondisi para pengungsi di Bangladesh memprihatinkan karena terinfeksi sejumlah penyakit seperti *Global Acute Malnutrition* (GAM), *Severe Acute Malnutrition* (SAM), pneumonia, bronkitis, penyakit kulit, HIV, dan hepatitis. Meskipun mengalami isu yang sama dalam penanganan permasalahan pengungsi, namun Indonesia memutuskan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh. Dalam hal ini, Indonesia telah mendistribusikan ke 12 titik pos di daerah Cox Bazar, dimana Indonesia telah mengirimkan 54 ton bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras, 14000 selimut, 2004 paket makanan siap saji,

20 unit tenda besar, 10 unit tanki air fleksibel, 900 paket pakaian, dan 1 ton gula pasir. Pemberian bantuan oleh Indonesia ini disebabkan oleh tingginya jiwa kemanusiaan yang dimiliki Indonesia yang sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Sementara itu, penelitian Matthew (2020) menjelaskan bahwa konflik etnis Rohingya di Myanmar telah lama menjadi isu yang krusial di dunia global. Oleh karena itu, konflik ini memerlukan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikannya. Konflik ini juga menyebabkan terjadinya eksodus besar-besaran masyarakat etnis Rohingya ke luar negaranya, dimana Indonesia dalam hal ini sebagai salah satu negara yang menerima kedatangan para pengungsi. Indonesia sebagai negara yang berdaulat, tentu memiliki kepentingannya sendiri, termasuk juga dalam hal penanganan konflik Rohingya. Namun, eksistensi pengungsi Rohingya di Indonesia tidak disambut dengan baik oleh masyarakat karena adanya sentimen negatif dari sebagian masyarakat Indonesia terhadap para pengungsi. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia tidak bisa serta merta mendeportasi pengungsi Rohingya ke negara asal karena Indonesia tidak bisa merealisasikan kepentingan nasionalnya dalam mewujudkan perdamaian dunia dan menjaga stabilitas dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia melalui prinsip bebas dan aktif melakukan cara-cara persuasif seperti pemberian bantuan langsung, pengajuan proposal kemanusiaan, dan tatap muka serta dialog secara langsung baik antar pemimpin negara maupun perwakilannya.

Tidak hanya itu, penelitian Tirza Listiarani (2020) mengeksplanasikan bahwa tidak sedikit pengungsi Rohingya masih berada di tengah lautan selama berhari-hari. Kedatangan para pengungsi pada awalnya ditolak, namun Indonesia pada akhirnya tetap menerima pengungsi Rohingya. Penerimaan para pengungsi terjadi pasca Indonesia menghadiri rapat dengan Malaysia dan Thailand yang menghasilkan 4 komitmen. Ketiga negara ini berkomitmen untuk mendorong penanganan akar masalah dari migrasi etnis Rohingya, menyalurkan bantuan kemanusiaan, mendesak terciptanya kerja sama internasional, dan mendorong mekanisme penanganan masalah. Meskipun Malaysia dan Thailand pada 2020 menolak kedatangan para pengungsi, Indonesia tetap mempersilahkan para pengungsi untuk masuk ke wilayahnya. Indonesia tidak menolak kedatangan pengungsi Rohingya karena adanya tekanan dari dunia internasional. Tekanan internasional ini muncul akibat adanya pandangan bahwa adanya dominasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas, penelitian ini lebih berfokus untuk mengkaji faktor apa saja yang

mendorong Indonesia dalam memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya tahun 2020-2022. Selain itu, penelitian ini akan secara spesifik membahas penerimaan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Pembahasan ini akan ditinjau baik melalui eksternal maupun domestik. Tidak hanya itu, pembahasan pada penelitian ini memiliki batasan pada ruang lingkupnya. Dalam hal ini, ruang lingkup dari penelitian ini berada di kawasan Asia Tenggara, sehingga analisis penelitiannya ada di tingkat regional. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis faktor eksternal yang mendorong Indonesia dalam memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya di tingkat kawasan, dimana penelitian ini juga akan mengkomparasikan kondisi Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara sehingga Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang masih menerima pengungsi Rohingya pada 2020-2022.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji faktor-faktor yang mendorong Indonesia dalam memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Metode penelitian kualitatif ini dapat dikatakan sebagai jenis metode yang memanfaatkan fenomena sosial dan sarana berpikir ilmiah seperti bahasa untuk melakukan kajian (Creswell, 2014). Pada dasarnya, jenis metode penelitian ini berupaya untuk mengeksplanasikan suatu fenomena atau kejadian. Selain itu, metode penelitian ini juga dapat mengilustrasikan fenomena atau kejadian tertentu dengan bantuan himpunan informasi berupa data dan dikaji menggunakan data non-numerik (Lamont, 2015). Tidak hanya itu, penelitian bermetode penelitian ini mengharuskan keterlibatan dari penulis sehingga dapat mengkaji secara komprehensif dan mendalam (Creswell, 2003).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan sekunder. Baik data primer maupun sekunder dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan *data internet based-research*. Data primer ini diperoleh dari situs resmi UNHCR. Sementara itu, data sekunder ini berasal dari jurnal, buku, hingga dokumen dari sejumlah partai. Tidak hanya itu, teknik *internet based-research* juga dapat membantu penulis dalam menghimpun informasi maupun data dari sejumlah situs internet yang mempunyai kredibel (Moleong, 2007).

### **Kebijakan Luar Negeri: sebuah kerangka konseptual**

Menurut Kegley & Raymond (2012), apabila membahas terkait kebijakan luar negeri dan proses pengambilan keputusan, maka yang dimaksud yaitu tujuan di luar negeri dari suatu negara, kandungan nilai yang melandasi tujuan tersebut, serta instrumen yang dimanfaatkan dalam mewujudkannya. Di sektor politik, negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang terlibat dalam

penyusunan kebijakan luar negeri (James et al., 2006). Dalam hal ini, K.J. Holsti (1992) mengungkapkan bahwa kebijakan luar negeri merupakan alat negara di sektor politik yang digunakan pada hal yang berkaitan dengan aktor lain dalam sistem dunia internasional guna meraih kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri juga dapat dimaknai sebagai proses negara dalam penetapan kebijakan dan aksi diplomatis. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan antara kebijakan dalam negeri dengan kebijakan luar negeri. Akan tetapi, kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri kini telah saling berkaitan satu sama lain. Kaitan ini disebabkan karena adanya pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan dalam negeri suatu negara terhadap kondisi di luar negeri (Morin & Paquin, 2018).

Selain itu, Kegley & Raymond (2012) memaparkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri. Tiga faktor ini di antaranya faktor eksternal, domestik, dan individu. Faktor eksternal yang mempengaruhi yakni posisi geostrategis. Sementara itu, faktor domestik yang mempengaruhi yakni kondisi perekonomian dan jenis pemerintahan. Sedangkan, faktor individu yaitu keputusan & kapasitas pemimpin.

Pertama, posisi geostrategis. Letak geografis serta medan fisik mempengaruhi negara dalam perumusan suatu kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, letak geografis mempresentasikan batas-batas alam yang dapat memudahkan para pembuat kebijakan dalam penetapannya. Batas-batas alam ini mencakup perairan serta daratan yang bergunung-gunung. Posisi geostrategis ini berhubungan dengan geopolitik karena berfokus pada pengaruh dari faktor geografis kekuatan negara dan perilaku internasional. Dengan demikian, geopolitik dapat dimaknai sebagai aliran pemikiran yang memandang penentuan kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh lokasi, sumber daya, dan lingkungan fisiknya (Kegley & Raymond, 2012).

Kedua, kondisi perekonomian. Perekonomian suatu negara memberikan pengaruh penting dalam perumusan kebijakan luar negeri. Negara ini secara umum menjalankan peran aktif yang kian masif pada ekonomi politik global sejalan dengan kian majunya perekonomian negaranya. Perekonomian ini mengakibatkan negara di dunia dapat digolongkan menjadi tiga macam, di antaranya *Global North*, *Global South*, dan *Global East*. *Global North* meliputi negara-negara yang mempunyai perekonomian kuat yang berlokasi di utara khatulistiwa, sementara *Global South* mencakup negara-negara dengan perekonomian yang kurang berkembang yang berada di belahan bumi selatan, sedangkan *Global East* yaitu negara yang terletak di Asia yang perkembangan ekonominya pesat. Dengan demikian, tingkat produktivitas serta pendapatan negara juga memberikan pengaruh terhadap perumusan kebijakan luar negeri

dari negara berperekonomian lemah (Kegley & Raymond, 2012).

Ketiga, jenis pemerintahan. Meskipun realisme memandang negara akan mengambil tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan mereka, eksistensi jenis pemerintahan akan membatasi sejumlah pilihan, seperti pemanfaatan kekuatan militer guna meminimalisir ancaman. Namun, setiap pemimpin di masing-masing jenis pemerintahan berusaha untuk menjaga kekuasaannya dengan segala keterbatasannya. Baik jenis pemerintahan yang terbuka maupun tertutup tetap memerlukan dukungan yang terorganisir serta kepentingan politik dalam negeri untuk dapat bertahan lama. Di sistem demokrasi, kepentingan politik memiliki kecenderungan untuk meluas ke luar pemerintah itu sendiri. Hal ini berhubungan dengan opini publik, kelompok kepentingan, dan media massa pada proses penetapan kebijakan. Dengan demikian, negara demokrasi akan merespon isu-isu dengan lebih lambat karena banyaknya elemen yang terlibat, eksistensi tanggung jawab kepada publik, dan harus menanggapi campur tangan dari sejumlah kelompok kepentingan di dalam negeri (Kegley & Raymond, 2012).

Keempat, keputusan & kapasitas pemimpin. Faktor ini memberikan pengaruh terhadap penetapan kebijakan luar negeri karena pemimpin pada akhirnya yang menyusun kebijakan. Pemimpin baik secara sadar maupun tidak dapat dipengaruhi oleh asumsi rekan-rekannya yang akan berefek pada perilaku dari pemimpin itu sendiri dalam perumusan kebijakan. Para pemimpin di fase pertama akan menolak pilihan kebijakan yang mahal secara politis. Sementara itu, pilihan yang tersisa akan dievaluasi oleh para pemimpin melalui pengukuran biaya dan manfaat yang berhubungan dengan kepentingan negaranya. Dengan demikian, pemimpin dalam hal ini memerlukan informasi yang relevan karena kian masifnya perolehan informasi maka pemimpin akan lebih rasional dalam pengambilan keputusan (Kegley & Raymond, 2012).

### **Posisi Geostrategis dalam Keputusan Indonesia pada Penerimaan Pengungsi Rohingya**

Posisi geostrategis Indonesia memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya. Geostrategi pada dasarnya dimaknai sebagai ke mana arah geografis dari kebijakan luar negeri suatu negara. Geostrategi dalam hal ini dapat memperlihatkan arah kebijakan luar negeri secara geografis pada proyeksi kekuatan militer dan berbagai aktivitas diplomatik. Negara menjadi variabel utama dalam geostrategi yang menyebabkan geostrategi menjadi fokus negara dengan melakukan berbagai cara guna mempertahankan teritorinya dari serangan atau invasi dari negara lain di batas negara merupakan salah satu tolak

ukur pada keamanan teritori (Grygiel, 2006). Tidak hanya itu, geostrategi juga mempunyai korelasi dengan tiga hal di antaranya pertama dengan yang dimiliki atau kemampuan serta kekuatan yang dikenal dengan *national power*. Kedua, apa yang diinginkan yang berhubungan dengan tujuan atau kepentingan yang dikenal sebagai *national interest*. Ketiga, langkah atau strategi dalam merealisasikan suatu cita-cita (Fathun, 2018).

Indonesia memandang geostrategi sebagai salah satu wujud dari upaya perwujudan cita-cita proklamasi yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada proses pembangunan nasional. Pembukaan UUD 1945 ini menjadi landasan dalam penerapan geostrategi Indonesia (Setyaningrum et al., 2021). Geostrategi Indonesia pada intinya tidak bertujuan dalam mengembangkan kekuatan yang mendominasi suatu wilayah di luar kedaulatan nasionalnya. Landasan geostrategi Indonesia merujuk pada kondisi serta teknik yang mengembangkan potensi kekuatan nasional. Tujuan dari cara ini yaitu menjaga kemungkinan timbulnya bahasa serta mengancam kedaulatan Indonesia yang menyeluruh pada pembangunan nasional. Landasan implementasi Indonesia di kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Secara substansi, pembukaan UUD 1945 sangat jelas menyiratkan cita-cita, tujuan, serta kepentingan nasional (Mulyono, 2017).

Indonesia mempunyai 4 kepentingan dasar yang termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 dalam mewujudkan tujuan nasional untuk meraih cita-cita nasional. Kepentingan dasar ini mencakup kepentingan keamanan yang terwujud dalam perlindungan bagi tumpah darah Indonesia, kepentingan kesejahteraan berupa kesejahteraan Indonesia yang progresif, kepentingan kecerdasan berwujud kehidupan Indonesia yang cerdas, dan kepentingan dalam ketertiban dunia yang terwujud pada situasi dunia yang tertib dengan berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang sejauh 5 ribu kilometer di sepanjang garis khatulistiwa (Sasvia, 2019). Wilayah Indonesia yang luas mengakibatkan negara ini menyandang predikat sebagai negara kepulauan terbesar yang mengandung potensi kelautan di berbagai bidang. Indonesia tidak hanya dilihat sebagai teritori bioteknologi dan wisata maritim, perairan laut dalam dan mineral kelautan, tetapi juga industri pelayaran dan pertahanan, serta industri maritim dunia. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari letak wilayah yang strategis baik secara politik maupun ekonomi (Chen, 2014). Wilayah yang terbentang sejauh 5 ribu kilometer ini mengakibatkan Indonesia terintegrasi dengan negara lain karena adanya perairan yang mengkoneksikan, seperti laut Andaman dan selat Malaka.

Oleh karena terletak di antara samudera Pasifik dan Hindia, Indonesia

mengambil peran sebagai jembatan antar negara di benua Asia dan Australia yang menguntungkan Indonesia tidak hanya sebagai jalur perekonomian dunia, namun juga jalur perjalanan pengungsi ke Australia sehingga Indonesia dapat mencapai kepentingan nasionalnya di bidang perdamaian. Pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia pertama kali tiba di provinsi Aceh karena daerah tersebut dekat dengan laut Andaman dan selat Malaka sehingga dapat menjadi gerbang pertama bagi pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia. Pemahaman Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin Indonesia terhadap posisi geostrategis Indonesia terwujud pada kebijakan penerimaan pengungsi yang menjadi langkah penting dalam upaya perdamaian dunia. Indonesia dalam aktivitas internasional mempunyai 5 prioritas pada politik luar negerinya yang termuat pada prioritas 4+1 yang mencakup perbanyak diplomasi ekonomi, perlindungan, kedaulatan dan kebangsaan, serta peran Indonesia di kawasan maupun global. Sementara itu, nilai plusnya yaitu peningkatan infrastruktur diplomasi (Kemenlu RI, 2019). Prioritas ini memperlihatkan kepentingan Indonesia dalam pembangunan citra sebagai negara yang damai. Di kawasan Asia Tenggara, pembangunan citra oleh Indonesia ini dapat dilihat dari Indonesia yang menyepakati 5 poin konsensus yang meliputi penyerahan bantuan kemanusiaan, penghilangan tindakan kekerasan, penyelenggaraan dialog inklusif, perancangan utusan khusus, dan lawatan ke Myanmar (VOA, 2023).

Indonesia pada konflik Myanmar terus menjalankan perannya di kawasan, dimana hal ini sejalan dengan 5 prioritas dari kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia memainkan peran di dua aspek yakni aspek politik dan keamanan. Berdasarkan Ajawaila et., al (2022), Indonesia merupakan negara yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Myanmar dalam ikut serta menangani krisis Rohingya. Kepercayaan pemerintah Myanmar kepada Indonesia terlihat pada pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. Marsudi dengan Aung San Suu Kyi pada 2017. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan empat usulan kepada pemerintah Myanmar di antaranya mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan (Rosyid, 2019).

Selanjutnya, Indonesia kembali melakukan pertemuan dengan pemerintah Myanmar. Pertemuan ini terjadi pada gelaran Konferensi Tingkat Tinggi Darurat Organisasi Kawasan Asia Tenggara (KTT ASEAN). Pertemuan ini diselenggarakan setelah kudeta di Myanmar yang terjadi pada 1 Februari 2021 yang membicarakan penanganan konflik Rohingya (HRW, 2023). Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya juga memaparkan rencana guna memberikan

kemajuan terhadap penerapan konsensus. Pemaparan ini berlangsung pada rapat pengarahan Dewan Keamanan PBB bulan di bulan Maret (HRW, 2023).

Pada aspek keamanan, Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan di sejumlah gangguan. ASEAN yang menganut prinsip non-intervensi sehingga menimbulkan dilema karena tidak adanya otoritas dalam ikut campur konflik dan pelanggaran hak asasi manusia dalam negeri negara anggotanya (Ajawaila et al., 2022). Meskipun demikian, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim tidak bisa tinggal diam terhadap apa yang terjadi di Myanmar. Dalam hal ini, Indonesia mengamankan stabilitas kawasan dengan penyaluran bantuan kemanusiaan. Aksi Indonesia ini bertujuan karena apabila krisis kemanusiaan terjadi di Myanmar, maka instabilitas kawasan bakal terancam (Ajawaila et al., 2022).

### **Kondisi Perekonomian dalam Keputusan Indonesia pada Penerimaan Pengungsi Rohingya**

Pada tahun 2020, sebagian besar negara di dunia memiliki perekonomian yang mengalami kontraksi atau penurunan. Indonesia menjadi salah satu negara yang perekonomiannya mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa perekonomian Indonesia tidak tumbuh pada tahun 2020, melainkan mengalami penurunan sebesar 2,1 persen apabila dikomparasikan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia dikalkulasikan dengan berlandaskan pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita senilai Rp56,9 juta atau USD3.911,7. Laporan perekonomian Indonesia 2020 mencatat penurunan pertumbuhan perekonomian Indonesia diakibatkan oleh dua hal, antara lain:

Pertama, dampak Covid-19 yang menekan cukup berat perekonomian Indonesia. Covid-19 merupakan jenis penyakit yang menyebar di antara manusia yang belum pernah teridentifikasi pada manusia akibat virus Sars-CoV-2 melalui percikan batuk/bersin (Kemenkes RI, 2020). Virus ini menyebar dengan sangat cepat yang mengakibatkan Indonesia pada Desember 2020 memiliki lebih dari 700 ribu jiwa kasus positif dan menewaskan lebih dari 20 ribu jiwa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan pembatasan terhadap mobilitas termasuk penerapan protokol kesehatan yang meminimalisir penyebaran Covid-19, dimana pembatasan ini secara signifikan telah mempengaruhi dalam mengurangi aktivitas perekonomian masyarakat. Selanjutnya, adanya ketidakpastian terhadap perkembangan Covid-19 di Indonesia. Ketidakpastian yang terjadi di pasar keuangan global telah mendorong terjadinya penanaman modal di negara berkembang, termasuk

Indonesia yang mengalami kontraksi pada perekonomiannya (BI, 2020).

**Tabel 1. PDB Negara-Negara di Asia Tenggara (2020-2024)**  
**Actuals and Latest Projections**

	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	-2.1	3.7	5.3	5.0	5.1
Kamboja	-3.1	3.0	5.0	5.8	6.2
Malaysia	-5.5	3.1	8.7	4.5	4.5
Thailand	-6.2	1.6	2.6	3.4	3.6
Filipina	-9.5	5.7	7.6	6.0	5.8

Sumber: IMF, 2023

Pada tahun 2020, kondisi perekonomian Indonesia dapat dikatakan lebih baik apabila dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara. Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 lebih baik terlihat dimana perekonomian Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,1 persen. Akan tetapi, perekonomian Indonesia di tahun berikutnya tidak lagi mengalami kontraksi. Dalam hal ini, perekonomian Indonesia pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,7 persen dan 5,3 persen pada tahun 2022. Bank Dunia mencatat bahwa PDB Indonesia sebesar USD1,19 triliun pada tahun 2021. Angka ini setara dengan Rp16.970,8 triliun (BPS, 2022). Sementara itu, PDB Indonesia pada tahun 2022 sebesar USD1,32 triliun atau setara dengan Rp19.588,4 triliun (BPS, 2023).

Apabila dikomparasikan dengan negara tetangganya, PDB Indonesia lebih tinggi dari negara lain seperti Thailand dan Malaysia. Bank Dunia melaporkan Thailand pada tahun 2020 memperoleh PDB sebesar USD500,46 miliar, USD505,57 miliar di tahun 2021, dan USD495,34 miliar di tahun 2022. Sementara itu, PDB Malaysia pada tahun 2020 tercatat sebesar USD337,34 miliar, USD372,98 miliar di tahun 2021, serta USD406,31 miliar di tahun 2022. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun perekonomian Indonesia mengalami penurunan, perekonomian Indonesia masih lebih baik apabila dibandingkan dengan negara tetangganya di Asia Tenggara dan mengalami pertumbuhan di tahun berikutnya. Lebih baiknya perekonomian Indonesia terlihat pada alokasi anggaran bantuan yang dikeluarkan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya yang banyak meskipun mengalami kontraksi dalam perekonomiannya.

Indonesia yang memiliki kepentingan nasional dalam konflik etnis Rohingya didukung oleh kondisi perekonomian yang lebih baik. Lebih baiknya perekonomian Indonesia terlihat dimana Indonesia dalam beberapa waktu

mengalokasikan anggarannya untuk membantu penanganan krisis kemanusiaan ini. Dalam hal ini, Indonesia pada tahun 2020 menyalurkan uang sebesar USD500.000. Dukungan finansial ini diberikan oleh perwakilan pemerintah Indonesia. Pemberian bantuan ini terjadi setelah adanya penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan ASEAN tentang penerapan hibah untuk repatriasi pengungsi Myanmar (ASEAN, 2020). Alokasi anggaran Indonesia ini lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand yang mengalokasikan anggaran sebesar USD28.000 (The Daily Star, 2023).

### **Jenis Pemerintahan dalam Keputusan Indonesia pada Penerimaan Pengungsi Rohingya**

Indonesia termasuk dalam negara yang mengimplementasikan sistem presidensial dalam pemerintahannya. Sistem pemerintahan ini diimplementasikan secara jelas pada konstitusi Indonesia yang juga diperkuat dengan ciri-ciri dari sistem presidensial itu sendiri. Sistem demokrasi di Indonesia turut mengalami perkembangan dengan adanya implementasi dari pemilihan umum. Meskipun demikian, sistem pemerintahan yang bercorak parlementer juga masih dianut oleh Indonesia, dimana adanya sistem multipartai di Indonesia (Octovina, 2018). Sehingga, Republik Indonesia dalam hal ini dapat dikatakan sebagai negara yang menerapkan pemerintahan presidensial multipartai yang demokratis. Menurut Kegley & Raymond (2012), negara dengan sistem demokrasi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sistem pemerintahan otoriter dalam penetapan suatu kebijakan. Hal itu dikarenakan negara yang menganut demokrasi dalam perumusan kebijakan perlu memperhatikan sejumlah hal.

Sistem pemerintahan presidensial pada dasarnya menekankan pada pemisahan yang secara seimbang terhadap kekuasaan (Arman, 2018). Pembagian kekuasaan ini memicu lahirnya berbagai lembaga yang berlandaskan pada tugas yang berbeda dalam jenis dan fungsinya (Yulistyowati et al., 2016). Sistem pemerintahan Indonesia memiliki tiga macam kekuasaan diantaranya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan di Indonesia ini dikenal dengan terminologi "*Trias Politica*". Dalam hal ini, kekuasaan legislatif bertugas untuk Menyusun undang-undang, eksekutif yang menjalankannya, serta yudikatif yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Ketiga kekuasaan ini tidak memiliki kewenangan untuk saling membubarkan kekuasaan lainnya, sehingga ketiga kekuasaan ini tidak dapat saling menjatuhkan. Dengan demikian, Presiden dalam hal ini tidak dapat membubarkan parlemen, sebaliknya juga parlemen tidak dapat memberhentikan Presiden meskipun dukungan telah menghilang dari mayoritas suara di parlemen (Arman, 2018).

Oleh karena Indonesia merupakan negara yang demokratis, maka Indonesia setidaknya harus memperhatikan tiga hal dalam proses perumusan kebijakan. Kegley & Raymond (2012) menyampaikan bahwa ada tiga hal yang terlibat dalam perumusan kebijakan pada sistem demokrasi di antaranya opini publik, kelompok kepentingan, dan media massa. Pembentukan opini publik terjadi karena adanya peran dari media massa. Media massa termasuk media sosial merupakan tempat komunikasi massa yang dapat menjadi jembatan antara komunikator politik dengan masyarakat yang mampu untuk mempengaruhi dan membangun opini publik (Qadri, 2020). Media massa juga menjadi tempat penyaluran bagi opini publik yang akan berpengaruh pada proses perumusan kebijakan (Setiawan, 2019). Dalam menyalurkan informasi kepada publik, media massa melakukan framing. Framing merupakan salah satu cara media massa untuk menampilkan suatu peristiwa dengan menekankan bagian tertentu, menunjukkan aspek tertentu, dan memperluas cara bercerita tertentu dari suatu kejadian sehingga publik mudah untuk mengingatnya (Eriyanto, 2002).

Framing dapat dilihat dari 2 dimensi besar, yakni seleksi isu dan pemusatan atau pementingan aspek-aspek tertentu dari suatu kejadian. Framing berfokus pada penyajian definisi, eksplanasi, evaluasi, serta rekomendasi dalam suatu wacana guna memasukan kerangka berpikir tertentu terhadap suatu peristiwa (Eriyanto, 2002). Dalam hal ini, sejumlah media massa melakukan framing terhadap masyarakat Rohingya sebagai korban dari pemerintah Myanmar. Adapun contohnya seperti Kompas (2020) dan DW (2022), dimana Kompas (2020) menarasikan bahwa pemerintah Myanmar memperlakukan masyarakat Rohingya secara diskriminatif yang terlihat dari adanya penyitaan tanah dari masyarakat Rohingya oleh pemerintah Myanmar untuk diberikan kepada masyarakat yang beragama Buddha. Sementara itu, narasi tersebut juga ditampilkan DW (2022) dimana masyarakat Rohingya merupakan korban dari operasi pembersihan tentara Myanmar. Dengan demikian, informasi tersebut kemudian mengkonstruksi opini publik yang memandang pemerintah Myanmar adalah pelaku kekerasan dan masyarakat Rohingya merupakan korban dari pemerintah Myanmar yang harus dibela.

Sementara itu, kelompok kepentingan dapat dimaknai sebagai sekumpulan orang yang memiliki tujuan sama yaitu mempengaruhi pemerintah dalam proses perumusan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan kelompok (Maiwan, 2016). Dalam pengambilan keputusan penerimaan pengungsi Rohingya, Indonesia juga dipengaruhi oleh sejumlah kelompok kepentingan. Amnesty International yang merupakan kelompok gerakan pada sektor hak asasi manusia yang secara global mengkampanyekan untuk mewujudkan dunia dimana hak asasi manusia dapat dirasakan setiap orang menjadi salah satu

kelompok kepentingan dalam penerimaan pengungsi Rohingya. Dalam hal ini, *Amnesty International* (2020) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya menerima kapal yang berisi pengungsi Rohingya yang berusaha mengamankan dirinya ke wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, alasan keselamatan dan kemanusiaan menjadi dasar perlunya Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya.

Timbulnya desakan dari *Amnesty International* ini terjadi karena Indonesia dipandang memainkan peran penting dalam pencarian serta penyelamatan pengungsi dari luar negeri yang tercermin pada penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 (VOA, 2020). Selain itu, *Amnesty International* juga dalam penanganan pengungsi Rohingya memberikan tiga rekomendasi kepada pemerintah Indonesia. Pertama, melakukan pencarian dan evakuasi kapal yang berisi pengungsi Rohingya sesuai dengan mekanisme pada Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Kedua, menerapkan prinsip non-refoulement dengan tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal mereka. Rekomendasi ini timbul karena para pengungsi berisiko mengalami persekusi, penyiksaan, ataupun pembunuhan di luar hukum. Terakhir, memberikan jaminan terhadap kebutuhan dasar para pengungsi serta perlindungan terhadap hak-hak selama di tempat penampungan, termasuk menjamin keamanan dan keselamatan mereka, serta kebutuhan pangan, air, penampungan, dan kesehatan yang layak (*Amnesty International*, 2023). Rekomendasi ini bertujuan agar para pengungsi memperoleh kehidupan yang lebih layak di Indonesia.

Selain *Amnesty International*, desakan kepada Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya juga datang dari Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. LBM PWNU mendorong pemerintah Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya karena penyelamatan terhadap pengungsi merupakan perintah agama dan kemanusiaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (VOA, 2020). Dalam hal ini, *Human Rights Watch* (HRW) juga mendesak Indonesia untuk mengambil tindakan dalam penanganan krisis Rohingya. Desakan ini timbul karena adanya rasa prihatin terhadap masyarakat Rohingya (VOA, 2023). Dengan demikian, desakan dari sejumlah kelompok kepentingan ini kemudian mengakibatkan pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya secara sementara (Kompas, 2020).

### **Keputusan & Kapasitas Presiden Joko Widodo dalam Keputusan Indonesia pada Penerimaan Pengungsi Rohingya**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pemimpin mengacu pada orang yang memimpin. Pemimpin ini dapat ditinjau dari sejumlah aspek, salah satunya aspek terjadinya. Berdasarkan aspek terjadinya, pemilihan pemimpin dilakukan oleh orang yang akan dipimpinya. Adapun contohnya meliputi presiden, gubernur, dan kepala desa yang dipilih oleh rakyat (Wijaya et al., 2015). Indonesia dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai pemimpin dikarenakan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden tergolong dalam kekuasaan eksekutif dimana Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri (Octovina, 2018). Presiden sebagai pemimpin memiliki kewenangan pada penyelenggaraan hubungan luar negeri. Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan lainnya diantaranya pernyataan perang, penyusunan perdamaian, dan perjanjian yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan Presiden ini termuat dalam Pasal 6 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Meskipun demikian, Presiden tetap dapat mengesahkan peraturan tanpa memerlukan persetujuan DPR, seperti Peraturan Presiden (Perpres). Pengesahan Perpres ini adalah hasil keputusan Presiden yang dibantu oleh kementerian terkait.

Peraturan Presiden (Perpres) merupakan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari keputusan Presiden dalam pelaksanaan UU serta penyelenggaraan dari kekuasaan pemerintah. Sebelum Pengesahan UU Nomor 10 Tahun 2004, Perpres dikenal sebagai Keputusan Presiden. Hal ini termuat dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 (Husen, 2019). Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) berada di atas dari Perpres. Tingkatan ini memperlihatkan bagaimana kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan. Meskipun Perpres memiliki kekuatan hukum yang lebih lemah dibandingkan dengan UU/Perpu dan PP, namun kekuatan hukum Perpres tetap mengikat.

Kerja sama antara Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisararis Tinggi Urusan Pengungsi dan/atau organisasi internasional menjadi dasar dari penanganan terhadap pengungsi luar negeri yang tertuang dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Pengesahan terhadap Perpres ini terjadi karena banyaknya informasi dan pemberitaan tentang para pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di perairan Indonesia. Banyaknya informasi dan pemberitaan ini mengakibatkan pemimpin Indonesia dapat memutuskan kebijakan dengan rasional. Dalam hal ini, Kegley & Raymond (2012) memaparkan bahwa tanpa adanya informasi relevan yang diperoleh, pemimpin akan cenderung memutuskan suatu kebijakan berdasarkan pada suka atau tidak

suka secara pribadi. Dengan demikian, semakin banyaknya perolehan informasi yang dimiliki pemimpin terkait urusan internasional, pemimpin tersebut akan semakin besar untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang rasional.

Perpres memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh elemen dan wilayah di Indonesia, termasuk Aceh yang menjadi daerah bagi para pengungsi untuk ditampung secara sementara. Aceh merupakan salah satu provinsi memiliki otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia apabila mengacu ke UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pemberian otonomi khusus kepada Aceh mengakibatkan provinsi tersebut memiliki kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dengan independen. Akan tetapi, pemerintah Aceh tidak mengurus politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu di sektor agama. Sehingga, permasalahan pengungsi ini diserahkan dan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, Aceh wajib mengikuti Pemerintah Indonesia saat Pemerintah Indonesia memutuskan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi pengungsi dari luar negeri.

Meskipun demikian, penerapan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 pada awalnya tidak berjalan dengan baik karena adanya hambatan yang menjadi kendala pada penanganan pengungsi dari luar negeri. Hambatan yang dialami pada penanganan pengungsi luar negeri yaitu adanya kecemburuan sosial dari warga setempat terhadap pengungsi dan tidak semua tempat/*shelter* pengungsi dapat menerima pengungsi karena peningkatan yang signifikan (Paramitha, 2016). Oleh karena itu, sosialisasi mengenai Perpres ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin (Novianti, 2019). Sehingga, Indonesia dalam hal ini tetap harus menerima para pengungsi meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Konvensi Internasional memuat prinsip *non-refoulement*, dimana negara diharuskan untuk menerima para pengungsi. Prinsip ini juga mengharuskan setiap negara untuk menerima, menyediakan tempat, perlindungan, dan pelayanan kepada para pengungsi (Kemenkumham, 2022). Tidak hanya itu, para pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia harus diberikan hak perlindungan selama menetap di Indonesia karena Indonesia telah meratifikasi *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) tahun 1948 (Saputri, 2022).

Presiden Joko Widodo dalam penerapan Perpres Nomor 125 tahun 2016 berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan sejumlah langkah-langkah. Adapun langkah-langkah tersebut di antaranya penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian (Novianti, 2019). Berhubungan dengan penemuan pengungsi pada keadaan darurat di teritori

Indonesia, Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin menugaskan badan yang mengurus bidang pencarian dan pertolongan serta menjalin kerja sama dengan International Organization for Migration (IOM). Sementara dalam penampungan pengungsi, Presiden Joko Widodo melibatkan pemerintah daerah untuk menyediakan tempat penampungan serta fasilitas air bersih (Novianti, 2019). Keterlibatan berbagai pihak memperlihatkan bahwa Presiden Joko Widodo ingin Perpres Nomor 125 Tahun 2016 berjalan dengan baik di bawah kepemimpinannya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan penelitian ini yang menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya tahun 2020-2022, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat empat faktor baik berasal dari dalam maupun luar negeri yang mempengaruhi keputusan Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya. Faktor pertama yakni posisi geostrategis. Wilayah Indonesia dapat dikatakan berada di posisi strategis karena terletak di posisi silang yang menguntungkan Indonesia pada bidang perdamaian. Pemahaman Presiden Joko Widodo terhadap posisi geostrategis tercermin pada penetapan 5 prioritas politik luar negerinya pada aktivitas internasionalnya. Kebijakan untuk menerima pengungsi menjadi bukti yang mewakili dari 5 prioritas politik luar negeri.

Selanjutnya ialah kondisi perekonomian. Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pada pertumbuhannya, meskipun demikian penerimaan para pengungsi Rohingya tetap dilakukan oleh Indonesia. Perekonomian Indonesia dapat dikatakan masih lebih baik apabila dikomparasikan dengan negara lain. Sehingga, Indonesia merasa mampu untuk mempertahankan kebijakannya dalam menampung pengungsi Rohingya secara sementara. Ketiga yaitu jenis pemerintahan. Dalam penetapan setiap kebijakan, Indonesia sebagai negara demokratis senantiasa mendapatkan pengaruh dari media massa, opini publik, dan kelompok kepentingan. Informasi yang disebarluaskan oleh media massa yang memosisikan masyarakat Rohingya sebagai korban dari pemerintah Myanmar kemudian membangun opini publik untuk mendorong pemerintah Indonesia untuk menampung pengungsi Rohingya. Dengan demikian, dorongan dari kelompok kepentingan ini telah mengakibatkan Indonesia memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya secara sementara.

Terakhir yakni keputusan dan kapasitas pemimpin. Sebagai pemimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo dalam perumusan suatu kebijakan dibantu oleh para menteri. Kementerian terkait akan menghimpun berbagai data dan

informasi yang berkaitan dengan pengungsi Rohingya. Informasi ini kemudian akan dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam penetapan Perpres oleh presiden. Eksistensi Perpres ini telah mengakibatkan Indonesia menjadi terdorong untuk menerima pengungsi Rohingya karena adanya kekuatan hukum yang mengikat.

### Daftar pustaka

- Ajawaila, D., Matulapelwa, A., & Ngogare, S. (2022). Peranan Indonesia dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P). *Jurnal Sains, Sosial, dan Humaniora*, 2(1), pp. 131-136.
- Amnesty International. (2020). Pemerintah Malaysia dan Thailand Harus Selamatkan Pengungsi Rohingya di Laut [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.amnesty.id/pemerintah-malaysia-dan-thailand-harus-selamatkan-pengungsi-rohingya-di-laut/>> [Diakses Juni 2023].
- Amnesty International. (2020). Selamatkan Pengungsi Rohingya yang Masuk Perairan Indonesia Demi Kemanusiaan [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.amnesty.id/selamatkan-pengungsi-rohingya-yang-masuk-perairan-indonesia-demi-kemanusiaan/>> [Diakses Juli 2023].
- Amnesty International. (2023). Surat Terbuka: Pemerintah Indonesia Harus Berperan Aktif dalam Penyelamatan Pengungsi Rohingya [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.amnesty.id/surat-terbuka-pemerintah-indonesia-harus-berperan-aktif-dalam-penyelamatan-pengungsi-rohingya/>> [Diakses Desember 2023].
- Anadolu Agency. (2020). Malaysia Tolak Masuk Kapal Berisi 300 Pengungsi Rohingya [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.aa.com.tr/id/regional/malaysia-tolak-masuk-kapal-berisi-300-pengungsi-rohingya/1874570#>> [Diakses Juni 2023].
- Arianta, K., Mangku, D. & Yuliartini, N. (2020). Perlindungan Hukum bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), pp. 166-176.
- Arman, Z. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), pp. 22-39.
- ASEAN. (2020). Indonesia funds US\$500,000 to support ASEAN efforts in the repatriation of displaced persons in Myanmar [Online]. Tersedia dalam: <<https://asean.org/indonesia-funds-us500000-to-support-asean-efforts-in-the-repatriation-of-displaced-persons-in-myanmar/>> [Diakses Desember 2023].

- Ashadi, W. (2022). Kudeta Junta Militer Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi 2021. *Dauliyah Journal*, 7(2), pp. 138-164.
- Augita, S. (2017). Peran Pemerintah Thailand dalam Mengatasi Pencari Suaka Rohingya di Thailand. *Journal of International Relations*, 3(1), pp. 30-38.
- Bangun, B. (2017). Tantangan ASEAN dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), pp. 569-587.
- Bank Indonesia. (2020). Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi [Online]. Tersedia dalam: <[https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI\\_2020.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI_2020.pdf)> [Diakses Juli 2023].
- Bauchner, S., & Harsono, A. (2023). Krisis Kemanusiaan Jadi Ujian Keketuaan Indonesia di ASEAN [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.hrw.org/id/news/2023/04/10/indonesias-asean-leadership-tested-myanmar>> [Diakses Desember 2023].
- BBC. (2021). Ratusan Pengungsi Rohingya di Aceh 'Kabur', Indonesia Menjadi Titik Lemah [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55798047>> [Diakses Juni 2023].
- BBC. (2023). Indonesia Tidak Bisa Jadi Satu-Satunya Negara yang Selamatkan Kapal Pengungsi Rohingya [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce972nv096no>> [Diakses Juni 2023].
- BPS. (2021). Ekonomi Indonesia 2020 Turun Sebesar 2,07 Persen (c-to-c) [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>> [Diakses Juli 2023].
- BPS. (2022). Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021 Tumbuh 5,02 Persen (y-on-y) [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesiatriwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html>> [Diakses Juli 2023].
- BPS. (2023). Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesiatahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html>> [Diakses Juli 2023].
- Brilianto, M., Fikri, A. & Hardianty, I. (2022). Kedudukan Pengungsi Taliban di Indonesia Ditinjau Dari Asas Non-Refoulement. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), pp. 299-313.
- Chen, J. et al. (2014). *New Perspectives on Indonesia: Understanding Australia's Closest Asian Neighbour*. Perth: Perth USAsia Centre.

- CNN Indonesia. (2017). Jumlah Pengungsi Rohingya di Bangladesh Lampau 400 Ribu [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170916194259-106-242212/jumlah-pengungsi-rohingya-di-bangladesh-lampau-400-ribu>> [Diakses Desember 2023].
- Creswell, J. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (2nd eds). London: SAGE.
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th eds). London: SAGE.
- Ebbighausen, R. (2022). Tidak Ada Perspektif bagi Warga Muslim Rohingya di Myanmar [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.dw.com/id/tidak-ada-perspektif-bagi-warga-rohingya-di-myanmar/a-62913650>> [Diakses Desember 2023].
- Eriyanto, E. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Faruque, E. (2020). Rohingya Refugee Crisis in Bangladesh: The Case of UNHCR's Response. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), pp. 28-40.
- Fathun, L. (2018). Geo Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi. *Islamic World and Politics*, 2(2), pp. 317-344.
- Grygiel, J. (2006). *Great Power and Geopolitical Change*. Maryland: The John Hopkins University Press.
- Human Right Watch. (2000). *Burmese Refugees in Bangladesh: Still No Durable Solution* [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.hrw.org/report/2000/05/01/burmese-refugees-bangladesh/still-no-durable-solution>> [Diakses Juni 2023].
- IMF. (2023). *Regional Economic Outlook for Asia and Pasific, May 2023* [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.imf.org/en/Publications/REO/APAC/Issues/2023/04/11/regional-economic-outlook-for-asia-and-pacific-april-2023>> [Diakses Juli 2023].
- James, P., Michaud, N. & O'Relly, M. (2006). *Handbook of Canadian Foreign Policy*. Minneapolis: Lexington Books.
- Karina, M. (2020). Perbandingan Kebijakan Malaysia dan Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya. *Padjajaran Journal of International Relations*, 2(2), pp. 158-169.
- Kegley, C. & Raymond, G. (2012). *The Global Future: A Brief Introduction to World Politics*. Boston: Wadsworth.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). *Komitmen Kemanusiaan Negara Terhadap Pengungsi Internasional* [Online]. Tersedia dalam:

- <<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional>> [Diakses Juli 2023].
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) [Online]. Tersedia dalam: <[https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-04\\_Pedoman\\_P2\\_COVID-19\\_27\\_Maret2020\\_TTD1.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-04_Pedoman_P2_COVID-19_27_Maret2020_TTD1.pdf)> [Diakses Juli 2023].
- Kementerian Luar Negeri RI. (2019). Indonesia FM Presents the Diplomacy Priorities 2019 - 2024 to the House of Representatives [Online]. Tersedia dalam: <<https://kemlu.go.id/portal/en/read/786/berita/indonesian-fm-presents-the-diplomacy-priorities-2019-2024-to-the-house-of-representatives>> [Diakses Juli 2023].
- Kementerian Luar Negeri RI. (2020). Indonesia Selamatkan dan Berikan Bantuan Kemanusiaan kepada 99 Orang Migran Etnis Rohingya [Online]. Tersedia dalam: <<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1417/berita/indonesia-selamatkan-dan-berikan-bantuan-kemanusiaan-kepada-99-orang-migran-etnis-rohingya>> [Diakses Juni 2023].
- Kosem, S. & Saleem, A. (2016). "Religion, Nationalism, and the Rohingya's Search for Citizenship in Myanmar" in Mason, R. Muslim Minority-State Relations: Violence, Integration, and Policy. London: Palgrave Macmillan.
- Lamont, C. (2015). Research Methods in International Relations. London: SAGE
- Listiarani, T. (2020). Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menerima Pengungsi Rohingya di Indonesia. *Jurnal Power in International Relation*, 5(1), pp. 19-32.
- Maiwan, M. (2016). Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan dan Kedudukannya dalam Sistem Politik. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2), pp. 75-91.
- Mangku, D. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), pp. 1-15.
- Mangku, D. & Lasmawan, I. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Kaum Etnis Uighur dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), pp. 231-240.
- Mashabi, S. (2020, Juni 30). Menlu: atas Nama Kemanusiaan, Indonesia Menerima Sementara Pengungsi Rohingya [Online]. Tersedia dalam: <<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/30/19372761/menlu-atas-nama-kemanusiaan-indonesia-menerima-sementara-pengungsi-rohingya>> [Diakses Juli 2023].

- Matthew, G. (2020). Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya di Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1), pp. 39-52.
- Mazhar, M. & Goraya, N. (2016). Plight of Rohingya Muslims. *Journal of Research Society of Pakistan*, 53(1), pp. 27-40.
- Mohajan, H. (2018). History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims. *Munich Personal Repec Archive*, 2 (1), pp. 19-46.
- Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Morin, J. & Paquin, J. (2018). *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. Cham: Springer Nature.
- Moy, L. & Kusuma, A. (2016). Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis). *Global Insight Journal*, 1(1), pp. 60-75.
- Mulyono, H. (2017). Geostrategi Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 29, pp. 19-30.
- Novianti, N. (2019). Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 10(2), pp. 281-300.
- Octovina, R. (2018). Sistem Presidensial di Indonesia. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), pp. 247-251.
- Paramitha, N. (2016). Peranan UNHCR terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Rohingya. pp. 1-8
- Prabowo, G., & Gischa, S. (2020). Krisis Rohingya di Myanmar [Online]. Tersedia dalam:  
<<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/03/130323969/krisis-rohingya-di-myanmar>> [Diakses Desember 2023].
- Qadri, M. (2020). Pengaruh Media Sosial dalam Membangun Opini Publik. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), pp. 49-63.
- Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Myanmar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), pp. 613-635
- Sadewa, D., Heryadi, D., & Hidayat, T. (2019). Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 15(2), pp. 89-103.
- Saputri, E. (2022). Kebijakan Anti-Resettlement Australia Kepada Indonesia Sebagai Negara Transit Tahun 2014-2021. *eJournal Hubungan Internasional*, 10(2), pp. 567-582.
- Sekretariat Kabinet RI. (2017). Presiden Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri [Online]. Tersedia dalam:

- <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri/> [Diakses Juni 2023].
- Setiawan, A. (2019). Peran Media Massa dalam Politik Luar Negeri: Kasus di Indonesia. *Mandala: Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), pp. 45-63
- Setyaningrum, R., Trisiana, A., & Kirana, A. (2021). Geostrategi Indonesia melalui Pendekatan Kesejahteraan dalam Konsep Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi. *Jurnal Global Citizen*, 10(1), pp. 1-11.
- The Daily Star. (2023, September 20). Thailand Gives 1 million Baht for Rohingya Refugees Food [Online]. Tersedia dalam: <https://www.thedailystar.net/rohingya-influx/news/thailand-gives-1-million-baht-rohingya-refugees-food-3423631> [Diakses Desember 2023].
- Tuasikal, R. (2020). Ratusan Pengungsi Rohingya Ditolak Negara-Negara karena Covid-19 [Online]. Tersedia dalam: <https://www.voaindonesia.com/a/ratusan-pengungsirohingya-ditolak-negara-negara-karena-covid-19/5424195.html> [Diakses Juli 2023].
- UNHCR. (2018). UNHCR Thanks Indonesia and Malaysia for Rescue and Disembarkation of Rohingya Refugees, Calls on Countries in the Region to Comply with Maritime Search and Rescue Obligations [Online]. Tersedia dalam: <https://www.unhcr.org/news/press/2018/5/5ae81d624/unhcr-thanks-indonesia-malaysia-rescue-disembarkation-rohingya-refugees.html> [Diakses Juni 2023].
- UNHCR. (2022). Fact Sheet Indonesia in December 2022 [Online]. Tersedia dalam: <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2023/03/Indonesia-Fact-Sheet-December-FINAL-cleared.pdf> [Diakses Juni 2023].
- UNHCR. (2020). Fact Sheet Indonesia in June 2020 [Online]. Tersedia dalam: <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2020/08/Indonesia-Fact-Sheet-June-2020-FINAL.pdf> [Diakses Juni 2023].
- UNHCR. (2020). Fact Sheet Indonesia in November 2020 [Online]. Tersedia dalam: <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/01/Indonesia-Country-Fact-Sheet-November-2020.pdf> [Diakses Juni 2023].
- Untoro, Y., Idris, M. & Hardiwinoto, S. (2016). Peran ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Pencari Suaka yang Ada di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), pp. 1-16.
- VOA. (2023). Human Rights Watch Desak Indonesia Ambil Tindakan Soal Myanmar. Tersedia dalam:

- <<https://www.voaindonesia.com/a/human-rights-watch-desak-indonesia-ambal-tindakan-soal-myanmar/6915378.html>> [Diakses Desember 2023].
- Wardah, F. (2023, Juni 20). Kemlu RI: Konsensus Lima Poin Harus Jadi Pedoman Utama ASEAN untuk Bantu Myanmar [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.voaindonesia.com/a/kemlu-ri-konsensus-lima-poin-harusjadi-pedoman-utama-asean-untuk-bantu-myanmar/7144502.html>> [Diakses Juli 2023].
- Wijaya, A., Purnomolastu, N. & Tjahjoanggoro, A. (2015). *Kepemimpinan Berkarakter*. Sidoarjo: Brilian Internasional.
- World Bank. GDP (Current USD – Malaysia) [Online]. Tersedia dalam: <<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=MY>> [Diakses Juli 2023].
- World Bank. GDP (Current USD – Thailand) [Online]. Tersedia dalam: <<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=TH>> [Diakses Juli 2023].
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2016). Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), pp. 328-338.